

Kajian Tentang Modal Sosial Sebagai Pendorong Peran Serta Lembaga Lokal Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo)

Sila Pertikasari, Mardiyono, Solih Mu'adi

¹⁾ Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Abstrak

Permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Dari serangkaian cara dan strategi tersebut, masih berorientasi pada pengembangan infrastruktur, bantuan kredit, dan bantuan pendidikan. Padahal kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, yang melibatkan banyak faktor termasuk kelembagaan lokal dan modal sosial. Namun, kondisi modal sosial saat ini menunjukkan kecenderungan penurunan sehingga diperlukan upaya untuk pembenahan modal sosial dalam sebuah kelembagaan lokal yang ada. Untuk mengetahui bagaimana modal sosial dapat dimanfaatkan di dalam sebuah kelembagaan lokal (BKM), maka penelitian ini memfokuskan pada unsur-unsur modal sosial dalam kelembagaan lokal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKM dapat membangun modal sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan, seperti: Jejaring sosial yang dibangun melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sehingga menambah jaringan kerja kelompok rumah tangga miskin. Kepercayaan dibangun melalui dialog terbuka dengan warga dan pengelolaan kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan pinjaman modal usaha. Dan Norma yang dibangun melalui semangat kebersamaan (*gotong-royong*) dan hubungan timbal-balik antara kelompok usaha selaku penerima pinjaman dan Badan Keswadayaan Masyarakat selaku pemberi bantuan pinjaman.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa BKM dapat membangun modal sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, ketiga unsur modal sosial tersebut perlu dikembangkan lagi agar dapat memperoleh manfaat yang menguntungkan terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: modal sosial, kelembagaan lokal, kemiskinan

The Study of Social Capital as The Driving Role of a Local Agencies in The Fight Against Poverty (Ac Case Study in Desa Grinting, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo)

Abstract

The problem of poverty is still a challenge for developing countries, including Indonesia. Poverty alleviation programs have been implemented by ministries and agencies. From a series of ways and strategies, is still oriented towards the development of infrastructure, credit assistance, and educational assistance. Though poverty is a complex problem, which involves many factors including local institutional and social capital. However, the condition of social capital is currently showing a declining trend so it is necessary to reform the social capital within an existing local institutions. To find out how social capital can be utilized in a local institution (BKM), this research focuses on the elements of social capital in local institutions.

The results showed that BKM can build social capital in poverty reduction efforts, such as: social networks built through the formation of Self Help Groups thereby increasing network of poor households. Trust is built through open dialogue with residents and management of the Group of Governmental with the opportunity to obtain assistance loan. And Norma were built in the spirit of togetherness (*gotong-royong*) and the reciprocal relationship between the business group as the recipient of loans and Community Self- Reliance Agency as aid loans.

The conclusion from this study that the BKM can build social capital in poverty reduction efforts. However, the three elements of social capital needs to be developed further in order to obtain lucrative benefits, especially in poverty reduction efforts.

Keywords: local agencies; social capital; poverty

Alamat Korespondensi Penulis:

Sila Pertikasari

Email : Mychila.007@gmail.com

Alamat : Fak. Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu tantangan dari kebanyakan negara berkembang, sehingga penurunan angka kemiskinan merupakan tujuan utama dalam perencanaan pembangunan dinegara-negara tersebut, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), meski terjadi penurunan persentase secara tahunan (*year on year*), namun secara absolut jumlah penduduk miskin di bulan September 2015 yang sebanyak 28,51 juta penduduk lebih banyak dibandingkan dengan per September 2014 yang sebanyak 27,73 juta penduduk. Dalam rentang waktu satu tahun, jumlah kemiskinan di Indonesia bertambah sebesar 780 ribu jiwa. Tingginya angka kemiskinan ini mengindikasikan bahwa proses pemulihan ekonomi di Indonesia masih berjalan lambat seiring dengan adanya krisis ekonomi global yang melanda sebagian negara maju di benua Eropa dan Amerika. Permasalahan kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, implikasi permasalahan kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan menentukan kelangsungan pembangunan kualitas manusia itu sendiri yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam kaitan proses perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, maka masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang sangat dinamis, sehingga membutuhkan peran institusi, program serta metode pendekatan yang mampu menjawab permasalahan kemiskinan, yang bertumpu pada beberapa nilai dasar filosofi yaitu *rasa, karsa dan cipta* sebagai kata kunci dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial [1].

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Salah satu yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan adalah program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yakni dengan memberikan dukungan dana Rp. 100 juta hingga 200 juta untuk setiap desa tertinggal yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya, seperti pembangunan jalan desa atau embung desa sekaligus pembangunan saluran irigasi. Penguncuran dana untuk desa tertinggal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah melalui pembangunan desa.

Program-program pengentasan kemiskinan lainnya: PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K

(Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral [2]. Meskipun ada berbagai kelemahan program, namun pada umumnya solusinya bukan menghentikan sebagian besar program kemiskinan yang ada atau menciptakan program-program baru tapi menentukan dan melaksanakan perbaikan besar pada program yang ada sekarang atau program lanjutannya, yaitu meningkatkan secara signifikan manfaat bagi orang miskin seperti halnya pada program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Program ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan modal manusia, pembangunan ekonomi lokal, dan pemanfaatan modal sosial. Namun demikian, konsep dasar PNPM Mandiri memiliki kelemahan pokok, antara lain tidak fokus kepada penanggulangan sebab-sebab kemiskinan, tidak fokus pada pemberdayaan orang miskin, dan walaupun telah ada pergeseran paradigma, namun dalam praktiknya titik tekan paradigma itu justru bukan untuk menanggulangi kemiskinan [3]. Efektivitas penerapan program justru mengalami deviasi (penyimpangan), bahkan masih jauh untuk dapat dikatakan dapat 'keluar' dari *mainstream* model penanggulangan kemiskinan yang pernah diterapkan sebelumnya [4].

Pergeseran paradigma dan program dalam menanggulangi kemiskinan dalam program PNPM Mandiri kurang disertai aspek penataan kelembagaan politik, sosial, dan ekonomi kelompok miskin. Akibatnya, upaya penanggulangan kemiskinan menjadi kurang memiliki daya guna dan hasil guna. Konsep dan strategi penanggulangan kemiskinan di perdesaan, justru membuat "gemuk segelintir orang" sebagai dampak dari kurang tegasnya penentuan sasaran program. Hal ini menyebabkan program menyebar pada komunitas warga secara sporadis, dan bukan kepada orang miskin, karena program tidak dikhususkan bagi orang miskin, tetapi warga masyarakat secara luas. Dalam artian bahwa program yang berbasis pemberdayaan tersebut bukan secara khusus diperuntukkan bagi kelompok/orang miskin, tetapi lebih pada komunitas masyarakat pedesaan. Akibatnya, program yang diberikan kurang dapat menjawab persoalan utama kemiskinan yang dihadapi kelompok miskin. Intervensi yang dilakukan dalam PNPM Mandiri dengan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya membentuk organisasi

masyarakat warga yang dinamai secara generik dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk menanggulangi persoalan bersama yaitu kemiskinan secara terorganisasi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka pada kenyataannya tidak demikian. Komunitas yang ada, justru menjauhkan program dari orang miskin karena sistem penentuan program melalui *voting* dan demokrasi yang kompetitif. Bahkan, lembaga lokal yang diharapkan dapat menumbuhkan potensi modal sosial di masyarakat pada kenyataannya justru sebaliknya bahkan tidak jarang karena kesalahan dalam pendekatan, yang terjadi justru sebaliknya, mereduksi potensi modal sosial [5]. Akibatnya terjadi benturan-benturan sosial, baik dalam bentuk konflik, kekerasan, bahkan praktek korupsi yang mengacak-acak modal sosial di akar rumput, sehingga kelembagaan lokal yang ada di masyarakat mengalami degradasi.

Apalagi saat ini kondisi modal sosial di wilayah perdesaan Indonesia menunjukkan indikasi semakin melemah meskipun indeks modal sosial di perdesaan masih lebih baik daripada di wilayah perkotaan. Tahun 2012, indeks modal sosial di perdesaan sebesar 61,86 (maksimum 100) lebih tinggi dibandingkan dengan indeks modal sosial di perkotaan sebesar 56,77 [6]. Beberapa indikator yang dihasilkan berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) menunjukkan bahwa aktivitas gotong-royong pada masyarakat perdesaan mulai menurun, dari 94% desa yang masih melakukan gotong royong pada tahun 2003, menjadi 89% pada 2011 (dihitung dari persentase desa yang melakukan kegiatan gotong-royong). Kegiatan lembaga swadaya masyarakat juga turun drastis, dari 19% yang masih melakukannya pada tahun 2005, menjadi hanya 8% pada 2011. Pelemahan kondisi modal sosial ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak, karena peran modal sosial yang sangat *crusial* dalam pembangunan wilayah terutama dalam penanggulangan kemiskinan. Bahkan Bank Dunia memberi perhatian yang tinggi dengan mengkaji peranan dan implementasi modal sosial khususnya untuk pengentasan kemiskinan [7]. Modal sosial bermanfaat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dimana keterbatasan kapasitas dari efektivitas jaringan kerja (*networks*) yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin harus menjadi perhatian [8]. Network yang dimiliki masyarakat miskin tentu saja berbeda dengan *networks* yang dimiliki oleh masyarakat mampu, dan seringkali masyarakat miskin tidak 'dijinkan' bergabung dan terlibat dalam *networks* masyarakat mampu. Sebagai catatan, stratifikasi dalam kelas-kelas sosial terdapat pada seluruh kelompok masyarakat, dimana masyarakat miskin berada pada level

terbawah dari hirarki sosial, dan mengalami *social exclusion*.

Organisasi sosial, sistem kekeluargaan, organisasi masyarakat, dan jaringan informal sangat memengaruhi terhadap *outcomes* kemiskinan. Lembaga-lembaga sosial ini memiliki pengaruh terhadap aset-aset ekonomi, strategi dalam menyelesaikan masalah, memiliki kapasitas dalam meraih keuntungan, dan memiliki pengaruh dalam pembuatan keputusan. Masyarakat miskin yang memiliki modal sosial dalam level *bonding* melibatkan keluarga, kekerabatan, jaringan komunitas yang membantu dalam upaya strategi manajemen resiko yang cukup penting. Namun, mereka tidak memiliki modal sosial dalam level *bridging*, apalagi *linking*. Membentuk format *bridging* dan *linking* bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan membutuhkan keterlibatan pemerintah untuk melibatkan mereka dalam struktur kekuasaan.

Menurut Putnam bahwa inti modal sosial terletak pada tingkat komitmen warga masyarakatnya yang direfleksikan melalui keterlibatannya dalam hubungan kemasyarakatan khususnya keanggotaan dalam organisasi dan kelompok [9]. Oleh karena itu, peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat akar rumput harus ditingkatkan, khususnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan karena didalam organisasi sosial inilah modal sosial dapat dibangun melalui jejaring, norma, dan kepercayaan sosial (*networking, norms, and social trust*) yang akan mempermudah koordinasi dan kerjasama untuk memperoleh manfaat yang menguntungkan.

Penelitian tentang modal sosial telah banyak dilakukan, salahsatunya oleh Dwi Sulistyorini (2012) dengan judul "Analisis Peranan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat menunjukkan bahwa Kelompok dengan modal sosial yang tinggi akan terbiasa hidup dalam suasana gotong royong dan saling bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggalnya serta membantu memfasilitasi hubungan yang harmonis antara masyarakat serta pihak pemerintah kelurahan sehingga modal sosial yang terbangun tersebut memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan. Hal yang sebaliknya terjadi pada desa/kelurahan dengan modal sosial yang kurang seperti penelitian yang dilakukan oleh Aulia Widya Sakina (2011) dalam penelitiannya *Memahami Modal Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan*, penduduk di Kelurahan Muntilan, Kabupaten Magelang cenderung bersifat individualistik sehingga menimbulkan berbagai prasangka negatif atas apa yang terjadi dan atas apa yang dilakukan oleh individu lain dikelompoknya. Hal ini berakibat pada rusaknya ikatan sosial di dalam

kelompok-kelompok masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendegradasi modal sosial dari kehidupan masyarakat.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah ini merupakan salahsatu daerah yang mendapat prioritas pertama dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten, jumlah rumah tangga sangat miskin di Kecamatan Tulangan mencapai 6.230 KK. Dari jumlah tersebut, kelurahan/desa yang memiliki RTSM terbanyak adalah Desa Grinting sebanyak 498 KK. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Desa Grinting mengalami peningkatan jumlah rumah tangga sangat miskin. Pada pendataan pada tahun 2008, jumlah rumah tangga sangat miskin di Desa Grinting hanya sebesar 140 KK namun pada pendataan PPLS tahun 2011 jumlah tersebut mengalami kenaikan hampir 4 kali lipat menjadi 498 KK. Pemerintah telah menerapkan berbagai program percepatan pengurangan kemiskinan di daerah ini seperti Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Masyarakat (Jalin Kesra) baik berupa hewan ternak, gerobak dagang, santunan orang tua jompo (lanjut usia), penyaluran Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PNPM Mandiri. Dari serangkaian cara dan strategi tersebut, disamping tidak terintegrasi juga masih fokus pada pengembangan infrastruktur (modal fisik), bantuan kredit (modal keuangan) dan bantuan pendidikan (modal manusia). Padahal, kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang melibatkan banyak faktor termasuk kelembagaan lokal dan modal sosial.

Disatu sisi ada kelembagaan lokal di desa ini seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan modal sosial. Padahal, menurut Putnam (19993), bahwa modal sosial bekerja pada tingkatan kelompok, seperti: jejaring, norma dan kepercayaan (*network, norms and trust*) yang akan mempermudah koordinasi dan kerjasama untuk memperoleh manfaat yang menguntungkan.

Rumusan Masalah

Bagaimana modal sosial dapat dimanfaatkan di dalam sebuah kelembagaan lokal seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sehingga dapat meningkatkan perannya dalam upaya penanggulangan kemiskinan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengajukan konsep unsur-unsur modal sosial yang dapat dimanfaatkan dan

dikembangkan di dalam sebuah kelembagaan lokal sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi [10]

Metode yang digunakan adalah Studi Kasus, menurut Stake (1995) studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu [11]. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan data informan secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah terkait unsur-unsur modal sosial seperti; jejaring, norma dan kepercayaan yang dimanfaatkan dalam Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Grinting.

Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *teknik purposive*, dimana peneliti menentukan secara sengaja para informan di lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa sumber data dianggap paling tahu tentang informasi yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari: aparat desa, pengurus dan anggota BKM, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat sekitarnya.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara langsung dari sumbernya, serta data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka, buku-buku, dokumen, artikel, dsb yang menunjang penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut :

1. Pengamatan (Observasi)

Peneliti melakukan pengamatan terbuka dan melihat dari dekat keadaan objek yang diteliti.

secara langsung ke lokasi penelitian di Desa Grinting.

2. Wawancara (Interview)
Peneliti melakukan interview secara langsung dengan responden, dengan menggunakan alat bantu berupa panduan wawancara (interview guide).
3. Dokumentasi
Data yang digunakan oleh penulis berupa foto – foto yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BKM Sido Makmur di Desa Grinting.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Milles, Hubberman and Saldana [12]. yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu:

1. Kondensasi data,
Upaya yang digunakan penulis pada tahap kondensasi data ini adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari informan, yaitu aparat desa, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan masyarakat setempat. Penulis mengelompokkan data yang terkumpul dari informan sesuai dengan kategorinya berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Penulis memilah data ke dalam kategori tertentu berdasarkan atas teori dan konsep yang penulis gunakan.
2. Penyajian data,
Pada tahap penyajian data ini penulis membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu kajian modal sosial sebagai pendorong peran serta lembaga lokal dalam penanggulangan kemiskinan dapat diketahui dan dipahami dengan mudah.
3. Penarikan kesimpulan
Pada tahap ini, penulis melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Teori yang penulis gunakan adalah Teori Modal Sosial Putnam.

Hasil Dan Pembahasan

Perandan Fungsi BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat disingkat dengan BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk Kelurahan/Desa, dan sebagai lembaga, BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk Kelurahan/Desa. BKM dibentuk atas persetujuan, kesepakatan serta keputusan dari segenap lapisan masyarakat yang tinggal di Desa Grinting yang dilakukan melalui rembug warga secara berjenjang

mulai dari rembug warga rukun tetangga sampai rembug warga Kelurahan/Desa.

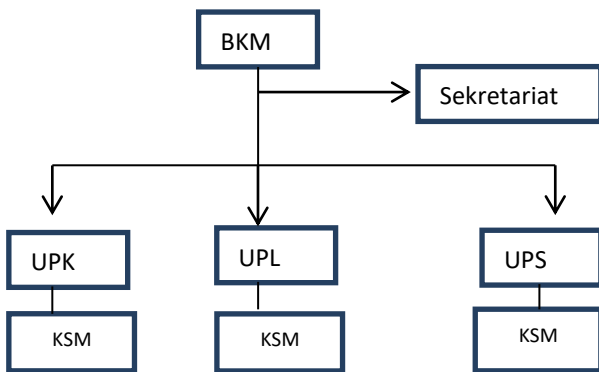
Peran BKM adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar proaktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan rnemperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana prasaana dasar serta lingkungan bagi masyarakat miskin.

Sedangkan untuk fungsi BKM Sido Makmur adalah sebagai berikut :

1. Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat.
2. Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb).
3. Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan.
4. Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya penanggulangan kemiskinan.
5. Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.
6. Pusat informasi dan kornunikasi bagi warga masyarakat Kelurahan/Desa; serta
7. Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program rnasyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah.

Struktur Organisasi BKM

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam pelaksanaan tugasnya BKM dibantu oleh perangkat organisasi yang berupa unit- unit pengelola. Oleh karena itu fungsi pelaksanaan kegiatan akan dilakukan oleh Unit – unit pengelola yang terdiri dari 3 (tiga) Unit Pengelola yaitu; UPK sebagai unit pengelola kegiatan lingkungan; UPS sebagai unit pengelola kegiatan sosial dan UPK sebagai pengelola unit kegiatan ekonomi. BKM bukanlah sebagai pelaksana program, akan tetapi berfungsi sebagai penggerak dan pengendali agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan. Berikut gambar struktur organinasi BKM untuk menjelaskan tugas masing masing unit.



Gambar 1. Struktur Organisasi BKM

Berdasarkan gambar struktur organisasi diatas, dapat diuraikan masing-masing tugas dalam hal ini adalah

1. Tugas Kesekretariatan
 - a. Menyusun agenda rapat/pertemuan BKM
 - b. Membuat dan menyebarkan surat undangan
 - c. Bertindak sebagai notulen dalam setiap acara / pertemuan BKM
 - d. Memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM
 - e. Mencatat administrasi keuangan operasional BKM dan mencatat pengelolaan BLM.
 - f. Melaporkan administrasi keuangan kepada BKM secara berkala.

Sedangkan untuk Unit Pengelola mempunyai tugas sesuai dengan bidangnya yaitu :

1. Unit Pengelola Keuangan (UPK)
 - a. Bekerjasama dengan BKM untuk menjamin terlaksananya program penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi;
 - b. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM
 - c. Monitoring dan evaluasi kegiatan – kegiatan KSM ekonomi
 - d. Mengelola keuangan pinjaman bergulir dan mengadministrasikannya
2. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)
 - a. Bekerjasama dengan BKM untuk menjamin terlaksananya program penanggulangan kemiskinan bidang lingkungan
 - b. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia
 - c. Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan bidang lingkungan
3. Unit Pengelola Sosial (UPS)

- a. Bekerjasama dengan BKM untuk menjamin terlaksananya program penanggulangan kemiskinan bidang sosial
- b. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia
- c. Mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia bidang sosial

Kegiatan Bidang Ekonomi

Kegiatan ekonomi yang terlaksana adalah berupa program pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan sistem pembayaran berangsur. Sasaran dari kegiatan di bidang ekonomi adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha-usaha produktif. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman modal usaha, maka masyarakat harus membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) terlebih dahulu. Sedangkan untuk pemilihan jenis usaha, masyarakat lebih banyak memilih jenis usaha dengan komoditi yang sama seperti warung kelontong. Manfaat yang didapatkan dari hasil kegiatan ekonomi diantaranya adalah membantu masyarakat dalam menambah modal untuk kegiatan produktif.

Kegiatan Bidang Lingkungan/ Infrastruktur

Secara akumulatif, hasil kegiatan di bidang lingkungan atau infrastruktur di Desa Grinting adalah perbaikan sarana dan prasarana dasar yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti: pembuatan jalan, jembatan, MCK, pembuatan saluran air, pembuatan jalan paving, serta pengerasan jalan.

Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari hasil kegiatan lingkungan (infrastruktur), diantaranya dapat membuka kesempatan bagi rumah tangga di pedesaan dalam membangun salahsatu unsur modal sosial seperti norma kebersamaan dan kerjasama melalui kegiatan gotong-royong. Selain itu, melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya sehingga mereka mendapatkan penghasilan dari hasil kerjanya sesuai dengan upah minimum setempat.

Dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana di desa tersebut, secara tidak langsung akan membuka dan meningkatkan akses ke wilayah tersebut sehingga membuka berbagai peluang pengembangan kedalam wilayah tersebut, khususnya tereksposnya berbagai potensi yang dimiliki. Lebih jauh, prioritas pembangunan prasarana fisik ini sebagai salah satu alternatif dari keterbatasan pemerintah dalam membangun prasarana fisik, khususnya

dalam pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemerintah secara keseluruhan.

Kegiatan Bidang Sosial

Kegiatan sosial yang terlaksana di Desa Grinting, antara lain adalah pemberian makanan tambahan balita, posyandu lansia, pelatihan menjahit, pelatihan merias, penyuluhan kesehatan, dsb. Kegiatan tersebut memiliki manfaat positif dalam menambah pengetahuan dan ketrampilan bagi rumah tangga miskin, menambah penghasilan serta menambah jaringan sosial.

Pemanfaatan Modal Sosial Dalam BKM

Pemanfaatan unsur modal sosial di dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Network (Jejaring)

Subdimensi jejaring dalam suatu komunitas atau kelompok, menurut Putnam (1995,2000) dikutip dalam (Vipriyanti, 2011) sangat diperlukan karena ia berpendapat bahwa meluasnya keanggotaan di suatu organisasi menunjukkan hubungan yang meluas secara positif yang berkaitan dengan kohesi sosial (*social cohesion*), dalam hubungan timbal balik dan rasa percaya.

BKM Sido Makmur membentuk jejaring melalui keanggotaannya yang terdiri dari berbagai unsur yang ada di masyarakat seperti: aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, KSM dsb. Keberagaman unsur tersebut menambah luas jaringan kerjasama BKM dengan kelompok lain dalam mencapai tujuan bersama. BKM juga memberikan kesempatan bagi warga untuk membentuk kelompok-kelompok sosial baru guna memperoleh bantuan usaha. Hal ini mendorong kaum perempuan di wilayah tersebut untuk melakukan optimalisasi terhadap kelompok sosial yang ada, seperti PKK, Kelompok Pengajian, dan kelompok arisan untuk difungsikan sebagai kelompok usaha. Bahkan, diantaranya ada yang membentuk kelompok-kelompok sosial baru agar dapat memenuhi persyaratan dalam upaya mendapatkan bantuan program.

Bentuk modal sosial inilah yang merupakan bentuk modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi atau masyarakat disebut dengan Modal Sosial Yang Menjembatani (*Bridging Social Capital*). Dengan keberagaman anggota yang dimiliki oleh BKM, maka akan memunculkan suatu sikap *outward looking* yang memungkinkan untuk menjalin koneksi dan jaringan kerja yang saling menguntungkan dengan asosiasi atau kelompok di luar kelompoknya. Kemajuan akan lebih

mudah dicapai karena lalulintas dan pertukaran ide akan terus berkembang dan memstimulasi perkembangan kelompok dan tentu saja individu dalam kelompok tersebut [13].

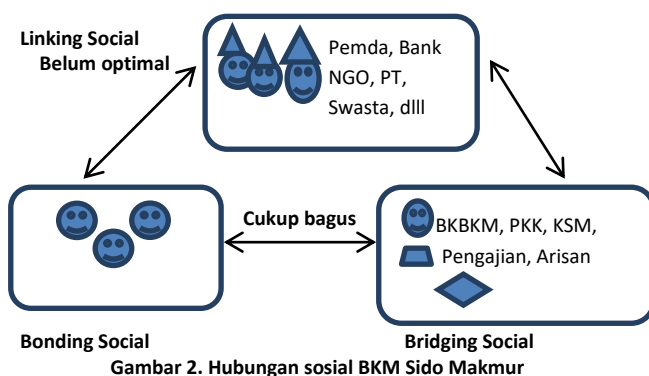
Namun demikian, hubungan atau jaringan sosial (*social linking*) yang dimiliki Badan Keswadayaan Masyarakat masih belum optimal. Komunikasi yang terjalin antara BKM dengan aparat desa setempat kurang berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai dari beberapa kegiatan BKM yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari aparat desa. BKM baru menyampaikan laporan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Menurut informasi yang kami dapat dikarenakan BKM tidak ingin kegiatan mereka mendapatkan campur tangan dari pihak aparat desa sehingga mereka tidak memberitahukan terlebih dahulu.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa BKM kurang dapat berkomunikasi atau bekerjasama dengan *stake holder* yakni aparat desa setempat. Kemampuan BKM untuk menjalin hubungan dengan pihak aparat desa merupakan salah satu hal terpenting sebagai upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik. Ketidakmampuan BKM untuk membangun nilai, institusi, dan mekanisme yang bersifat lintas kelompok akan membuat masyarakat yang bersangkutan tidak mampu mengembangkan modal sosial untuk membangun integrasi sosial [14].

Selanjutnya, untuk hubungan sosial BKM dengan pihak swasta dalam hal pengajuan bantuan modal usaha juga belum pernah dilakukan. Hal ini dikarenakan BKM tidak mempunyai jaringan koneksi dengan pihak luar yang dapat membantu mereka untuk memberikan fasilitasi pemasaran terhadap distribusi hasil usaha *home industri*.

Ada beberapa hal yang menyebabkan BKM tidak memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan koordinasi dengan pihak luar. Pertama, warga komunitas tersebut cenderung tidak memiliki inisiatif, kurang kreatif dan bersikap pasrah sehingga hal tersebut menyebabkan fasilitator juga mengalami kesulitan untuk memotivasi mereka. Kedua, tipologi modal sosial di desa ini bersifat *Bonding Social Capital*, dimana karakteristik dasar yang melekat pada tipologi ini lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) dibandingkan berorientasi ke luar (*outward looking*). Hal ini dikarenakan ragam masyarakat atau individu yang menjadi anggota kelompok ini umumnya bersifat homogenius yakni berasal dari suku bangsa yang sama, suku bangsa Jawa. Warga atau komunitas di desa ini memiliki modal sosial, namun kekuatannya hanya terbatas pada satu dimensi saja yaitu dimensi kohesifitas kelompok. Kohesifitas kelompok yang

terbentuk terjadi karena faktor keeratan hubungan emosional ke dalam yang sangat kuat. Sedangkan yang tidak dimiliki dalam kelompok ini adalah rentang radius jaringan (*The radius of networks*) yang terbentuk dan menghubungkan mereka dengan kelompok-kelompok lain lintas suku, kelas sosial, dan lintas profesi serta lapangan pekerjaan. Tipologi ketertutupan sosial inilah yang mengakibatkan mereka sulit mengembangkan ide-ide baru, orientasi baru, nilai serta norma baru yang memperkaya nilai dan norma yang telah ada. Ketiga, belum adanya pelatihan kapasitas BKM untuk meningkatkan kemampuan negosiasi dengan pihak luar.



Gambar 2. Hubungan sosial BKM Sido Makmur

2. Norma

Seperti halnya didalam BKM, norma dapat terwujud didalam semangat kebersamaan diantara warga masyarakat untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama demi mencapai tujuan bersama, misalnya gotong-royong dalam pemasangan paving jalan.

Contoh lainnya dimana norma dapat tumbuh dalam suatu jaringan adalah dalam hal hubungan timbal balik antara kelompok usaha selaku peminjam dana dengan pihak BKM selaku pemberi dana pinjaman usaha.

Namun demikian, norma yang disepakati dalam kelembagaan tersebut belum sepenuhnya terbentuk seperti misalnya sanksi bagi ketidakhadiran warga dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh BKM. Tidak adanya sanksi yang mengatur bagi warga yang tidak hadir tersebut, menyulitkan BKM untuk mengambil tindakan bilamana ada anggota yang tidak pernah mengikuti pertemuan.

3. Trust (Kepercayaan)

Upaya BKM untuk membangun kepercayaan dilakukan dengan menjalin dialog terbuka dengan masyarakat setempat melalui rapat pertemuan yang diselenggarakan di Balai Desa. Selain itu, *trust* dibangun melalui pemberian pinjaman

modal usaha kepada kelompok/rumah tangga miskin yang sebelumnya belum memiliki usaha. Namun demikian, BKM memberikan kepercayaan dan ekspektasi yang besar terhadap rumah tangga miskin untuk memanfaatkan pemberian pinjaman tersebut untuk mengembangkan modal usahanya.

Trust (kepercayaan) juga dibangun BKM melalui hubungan timbal balik dengan masyarakat, melalui pembentukan kelompok seperti Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM). Kejujuran dalam pengelolaan kegiatan KSM juga akan menjadi modal untuk dapat dipercaya oleh kelompok masyarakat yang lain baik warga kelurahan setempat atau pihak lain.

Pembenahan BKM Untuk Pengembangan Potensi Modal Sosial

Unsur modal sosial yang melekat pada kelompok atau institusi lokal seperti BKM merupakan salahsatu faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas atau efisiensi organisasi. Pembinaan yang sebaiknya dilakukan untuk pengembangan potensi modal sosial dalam lembaga tersebut adalah: 1) Perluasan jejaring sosial. Dengan mempunyai jaringan yang lebih luas akan memungkinkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk mengakses lebih banyak informasi dan sumberdaya serta bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Putnam, bahwa struktur jaringan yang lebih luas akan mempengaruhi kualitas hubungan yang terjalin, output yang dapat dihasilkan dan modal sosial yang terbentuk. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini adalah melalui perluasan jejaring sosial dalam kelompok sosial yang dapat dilakukan dengan mendorong berkembangnya organisasi sosial tersebut di pedesaan. Selain itu, diperlukan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dari organisasi sosial yang ada, misalnya pelatihan administrasi, manajerial, dan kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan jejaring sosial dan kerjasama yang baik dalam kelompok maupun dengan kelompok lain.

Pembenahan selanjutnya adalah perlu adanya norma atau aturan yang disepakati dalam kelembagaan lokal seperti misalnya sanksi bagi ketidakhadiran anggota masyarakat dalam pertemuan atau kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Selain itu, BKM harus menciptakan suasana yang kondusif sehingga masyarakat benar-benar merasa memiliki kelembagaan tersebut sebagai organisasi masyarakat yang berpihak membantu kebutuhan masyarakat, khususnya yang terkait dengan kemiskinan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan dan selanjutnya akan diungkapkan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan selama ini terkait pemanfaatan modal sosial dalam BKM sebagai berikut:

- Kepercayaan (*trust*) dibangun melalui kegiatan yang menumbuhkan kebersamaan yakni melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dan pengelolaan kegiatannya seperti dalam bidang keuangan dengan pemberian dana pinjaman bagi rumah tangga miskin untuk pengembangan modal usaha.
- Membangun jejaring sosial dengan memberikan kesempatan bagi rumah tangga miskin untuk tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan adanya pembentukan KSM akan menambah jaringan kerja (*network*) yang dimiliki kelompok masyarakat miskin.
- Menumbuhkan norma yang mencakup kejujuran, solidaritas dan hubungan timbal balik antara sesama anggota.

Pemanfaatan modal sosial dalam sebuah kelembagaan tersebut sudah cukup baik untuk membantu rumah tangga miskin, meskipun dalam praktiknya belum maksimal sehingga perlu adanya upaya pembenahan modal sosial yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- ❖ Perluasan jejaring sosial. Dengan mempunyai jaringan yang lebih luas akan memungkinkan BKM untuk mengakses sumberdaya dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
- ❖ Perlu adanya norma atau aturan yang disepakati dalam kelembagaan lokal seperti misalnya sanksi bagi ketidakhadiran anggota masyarakat dalam pertemuan atau kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh BKM.

Saran

Untuk lebih meningkatkan peran BKM sebagai organisasi sosial dalam penanggulangan kemiskinan terutama sebagai wadah dalam proses pengembangan modal sosial di tingkat akar rumput, maka ada beberapa hal berdasarkan hasil dan pembahasan, serta kesimpulan, disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para fasilitator agar melakukan pendampingan secara efektif dalam membangun modal sosial karena akan berdampak kepada tingkat keberdayaan masyarakat.

2. Kegiatan pengembangan modal sosial perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di dalam komunitas tersebut.
3. Diperlukan kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya organisasi sosial di perdesaan.

Daftar Pustaka

- [1] Sumodiningrat, Gunawan. 2008. Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
- [2] Hadi, S, 2010. *Studi Dampak Kebijakan Pembangunan terhadap Disparitas Ekonomi Antar Wilayah (Pendekatan Model SNSE)*.IPB
- [3] Indrajit.W, dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, Gagasan Manajemen Pembangunan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan*, Intrans Publising, 2004
- [4] Moch. Nurhasim, 2014. *Model Kebijakan Berbasis Good Governance*. Jakarta: LIPI Press
- [5] Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [6] Badan Pusat Statistik, 2009. *Stok Modal Sosial*, Badan Pusat Statistik 2009
- [7] Sahyuti, 2008. *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah*, UII Press
- [8] Oyen, Else. 2002. *Social capital formation as a poverty reducing strategy? in Social Capital and Poverty Reduction which role for civil society organizations and the state?*. UNESCO.
- [9] Vipriyanti, 2011. *Modal Sosial Dalam Pembangunan Wilayah*. Universitas Brawwijaya-Press
- [10] Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- [11] Creswell, John W, 2009, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- [12] Miles and Huberman, 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- [13] Hasbullah J, 2006, *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR United Press
- [14] Hermawanti, Mefi dan Hesti Rinandari. 2003. *Modul Pemberdayaan Masyarakat Adat: Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat*. Yogyakarta:IRE.